

Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pasar Terhadap Kinerja UPT Dalam Mewujudkan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar (Studi Kasus Di UPT Pasar Guntur Ciawitali Garut)

Ichwan Kuswana¹, Jusman Iskandar², Ikeu Kania³

^{1, 2}Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

¹24091118014@pasca.uniga.ac.id

²jusman.iskandar@uniga.ac.id

³ikeukania@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pasar Terhadap Kinerja UPT dalam Mewujudkan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar (Studi Kasus di Pasar Guntur Ciawitali Garut). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan teknik survey. Responden dalam penelitian ini sebanyak 76 orang pegawai UPT Pasar Ciawitali. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (*path analysis*). Hasil analisis deskripsi menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan retribusi pasar memiliki kriteria baik dengan indikator tertinggi pada dimensi komunikasi sebesar 86,05% sedangkan indikator terendah pada dimensi komunikasi sebesar 65,53%. Kinerja UPT memiliki kriteria baik dengan indikator tertinggi pada dimensi Hasil kerja sebesar 90,00% dan terendah pada dimensi Manfaat retribusi bagi pedagang sebesar 65,26% dan efektivitas kerja memiliki kriteria baik dengan indikator nilai tertinggi pada dimensi Penerapan sanksi administratif sebesar 91,05% dan terendah pada dimensi Penyediaan fasilitas balas jasa yang didapatkan pedagang sebesar 67,11%.

Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja, Pelaksanaan Kebijakan.

1. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menyebutkan bahwa salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar, Retribusi Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa kios dan los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah dari golongan retribusi jasa umum yang turut memberikan kontribusi terhadap PAD, dimana PAD menjadi tolok ukur kemampuan kemandirian pemerintah kabupaten atau kota dalam membiayai mobilitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah daerah harus memperhatikan efektivitas dari pemungutan retribusi pasar itu sendiri.

Pasar Guntur Ciawitali Garut termasuk dalam golongan pasar yang paling besar dari hasil kebijakan retribusi pasarnya dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut. Hal ini dikarenakan jumlah pedagang yang sangat banyak. Jumlah pedagang di Pasar Guntur Ciawitali sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 1.913 pedagang kios dan 1.499 PKL yang tersebar di 13 blok, seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Pedagang Pasar Guntur Ciawitali

No.	Sebaran Blok	Jumlah Pedagang Kios	Sebaran Blok	Jumlah PKL
1.	Blok A	176	PKL Blok I – J	572
2.	Blok B	154	PKL Jalan Tengah	51
3.	Blok C	168	PKL Jalan Barat	28
4.	Blok D	192	PKL Jalan Utara	199
5.	Blok E	192	PKL Jalan Selatan	119
6.	Blok F	168	PKL Blok A-D	76
7.	Blok G	168	PKL Blok B-C	72
8.	Blok H	192	PKL Blok C-F	60
9.	Blok I	80	PKL Blok F-G	56
10.	Blok J	126	PKL Blok D-E	78
11.	Blok K	109	PKL Blok E-F	68
12.	Blok L	55	PKL Blok G-I	56
13.	Blok M	133	PKL Blok H-J	64
Jumlah		1.913	Jumlah	1.499

Akan tetapi berdasarkan observasi pendahuluan, pemungutan retribusi pasar di Pasar Guntur Ciawitali Garut dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif. Hal ini merujuk pada sejumlah permasalahan antara lain: *Pertama*, realisasi penerimaan retribusi pasar tidak selalu mencapai target

Kedua, terdapat ketimpangan pada pengelolaan retribusi Pasar Guntur Ciawitali Garut yang belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa pasar. Di Pasar Guntur Ciawitali Garut yang merupakan pusat pasar di Kabupaten Garut, masih terdapat permasalahan mengenai lingkungan pasar yang kumuh, adanya tumpukan sampah, area yang tidak tertata, jalanan yang becek serta rawan tindak kriminalitas. Banyak pedagang mengeluhkan retribusi yang sudah dibayar tidak dialokasikan untuk perbaikan fasilitas. *Ketiga*, kios dan lapak tempat berjualan bagi pedagang belum tersedia secara memadai atau masih kurang dibandingkan dengan banyaknya pedagang, serta belum tertata dengan teratur, dimana hal itu dapat menyebabkan kurangnya penerimaan retribusi pasar.

Efektivitas pemungutan retribusi pasar dipengaruhi oleh berbagai aspek. Berdasarkan observasi awal, faktor yang diduga berkaitan dengan efektivitas pemungutan adalah kinerja UPT sebagai pihak yang memiliki wewenang pemungutan retribusi pasar.

Kinerja UPT dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang diduga berkaitan dengan kinerja adalah pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pasar, hal ini merujuk pada temuan sejumlah permasalahan di lapangan diantaranya:

Pertama, sosialisasi peraturan masih minim. Pihak UPT belum melakukan sosialisasi mengenai peraturan retribusi, baik kepada seluruh petugas UPT maupun kepada pedagang, sehingga menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi. *Kedua*,

kurangnya sumber daya manusia di lingkungan kantor UPT Pasar Guntur yang memiliki kompetensi menjalankan kebijakan retribusi pasar.

Keterkaitan kinerja dengan pelaksanaan kebijakan merujuk pada pendapat menurut Polidano yang dikutip oleh Ndraha (2013:503), bahwa “kinerja sangat penting agar kebijakan dapat diterapkan pada waktu yang tepat agar berhasil dan berguna”.

Fenomena-fenomena permasalahan di atas dirangkum sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan retribusi pasar belum optimal, terlihat dari sosialisasi peraturan masih minim dan kurangnya sumber daya manusia di lingkungan kantor UPT Pasar Guntur yang memiliki kompetensi menjalankan kebijakan retribusi pasar. Hal ini berkaitan dengan aspek komunikasi, SDM dan disposisi. Fenomena ini diasumsikan sebagai variabel bebas.
2. Permasalahan kinerja UPT antara lain penghitungan dalam penetapan jumlah retribusi rawan kesalahan dan memungkinkan terjadinya kebocoran keuangan, banyaknya pedagang yang menunggak pembayaran retribusi dengan berbagai alasan, apabila dilihat dari aspek administrasi, personal (petugas), evaluasi dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil belum terlaksana sesuai dengan harapan. Hal ini berkaitan dengan aspek *output* dan *outcome*. Fenomena ini diasumsikan sebagai variabel antara.
3. Efektivitas penerimaan retribusi pasar diindikasikan dengan selama beberapa tahun terakhir penerimaan belum sesuai target, ketimpangan pada pengelolaan retribusi Pasar Guntur Ciawitali Garut yang belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa pasar; kios dan lapak tempat berjualan bagi pedagang belum tersedia secara memadai serta belum tertata dengan teratur; di mana hal itu dapat menyebabkan kurangnya penerimaan retribusi pasar. Fenomena ini diasumsikan sebagai variabel terikat.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti menduga adanya hubungan sebab-akibat (*causal effectual*) yang menyebabkan efektivitas pemungutan retribusi pasar, yakni karena permasalahan pada kinerja UPT dan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar. Dari fenomena-fenomena di atas, peneliti menetapkan topik penelitian sebagai berikut: **“Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pasar Terhadap Kinerja UPT dalam Mewujudkan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar (Studi Kasus di Pasar Guntur Ciawitali Garut)”**.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan teknik survey. Menurut Iskandar (2013: 174) bahwa penelitian deskriptif ada hubungannya dengan pemaparan suatu fenomena atau hubungan antara dua fenomena atau lebih. Metode penelitian deskriptif dapat memperluas ruang lingkup menggunakan metode survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mengkaji gejala atau fenomena yang diamati.

Beberapa variabel penelitian yang telah dirumuskan pada tingkat dimensi tentunya dapat dioperasionalkan dengan baik. Oleh karena itu kebutuhan analisis perlu diturunkan sampai tingkat indikator dari masing-masing variabel tersebut sehingga memudahkan pengukuran variabel-variabel pokok penelitian. Operasionalisasi variabel penelitian ini meliputi dimensi-dimensi dan indikator-indikator yang akan mengarahkan tersusunnya alat instrumen atau alat ukur penelitian.

Operasionalisasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel-variabel Penelitian

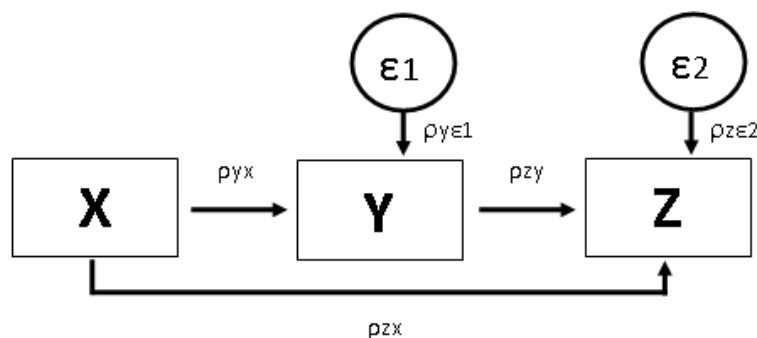
No.	Variabel	Dimensi	Indikator	Butir Item
1.	Pelaksanaan Kebijakan retribusi Pasar Edward (dalam Iskandar, 2019 :221)	1. Komunikasi	1. Kejelasan dan ketepatan kebijakan	1. Komunikasi yang jelas
				2. Kegiatan sosialisasi yang efektif
			2. Sasaran kebijakan	3. Evaluasi hasil sosialisasi
				4. Dukungan peraturan kebijakan
		2. Sumber Daya	1. Sumber manusia	1. Sesuai arah kebijakan
				2. Pelaksanaan yang terstruktur dan terarah
				3. Pelaksanaan yang tepat sasaran
				1. Ketersediaan sumberdaya manusia
			2. Sumber material lain	2. Kualifikasi dan kompetensi sdm
				3. Kualitas sumberdaya manusia
				1. Ketersediaan sumberdaya material
				2. Ketersediaan sarana dan prasarana
		3. Sikap Aparatur	1. Kesepakatan dikalangan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan	1. Komitmen pelaksana
				2. Komitmen aparatur UPT
		4. Struktur Birokrasi	2. Kemampuan pelaksana	3. Konsistensi pelaksana
				1. Kemampuan/kompetensi pelaksana
			1. Penggunaan sikap dan prosedur yang rutin	2. Sikap professional pelaksana
				3. Sikap sopan dan santun
			2. Fragmentasi dalam pertanggungjawaban diantara berbagai unit organisasi	1. Pembinaan secara berkala
				2. Evaluasi hasil pembinaan
				3. Evaluasi dan pelaporan
				4. Petunjuk teknis pelaporan
2	Kinerja UPT (Supriatna (dalam Iskandar, 2019: 269)	1 Input	1. Kemampuan teknis petugas	1. kemampuan pegawai dalam administrative
				2. kemampuan matematis
				3. kemampuan/keterampilan kerja
			2. Kemampuan komunikasi/persuasi	4. mampu berkomunikasi baik dengan rekan kerja/pimpinan
				5. ramah dan sopan dalam berkomunikasi
				6. mampu berkomunikasi baik dengan pedagang pasar/masyarakat
		2 Output	1. Hasil kerja	7. mampu bekerja secara professional
				8. Mampu melaksanakan tugas secara sistematis
			2. Keakuratan data retribusi	9. Cermat, trampil dan teliti ketika bekerja
				10. Tersedianya database pedagang pasar secara terpadu
				11. adanya pencatatan yang jelas berkenaan penraikan retribusi dari pedagang

No.	Variabel	Dimensi	Indikator	Butir Item
	3	Outcome	1	Jumlah retribusi yang ditarik setiap hari
			12.	pegawai melakukan penarikan retribusi secara rutin
			13.	petugas melakukan penagihan kepada pedagang yang menunggak retribusi
			14.	petugas memberikan apresiasi kepada pedagang yang patuh membayar retribusi
			15.	petugas memeberikan teguran pada pedagang yang tidak membayar retribusi
		Benefit	1	Manfaat retribusi bagi pedagang
			16.	pedagang menerima manfaat berupa kemandirian berdagang
	4	Benefit	17.	kenyamanan fasilitas sarana dan prasarana
			18.	pedagang menerima manfaat berupa kenyamanan
			19.	adanya peningkatan kas /pendapatan pemerintah
			20.	terciptanya kesejahteraan masyarakat
	5	Impact	1	Ketaatan terhadap peraturan pemerintah mengenai retribusi
			21.	terciptanya kesadaran pedagang akan pentingnya membayar retribusi pasar
			22.	terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan pemerintah daerah
			23.	sebagian besar masyarakat memahami aturan dari pemerintah daerah tentang kebijakan pasar
		Kontribusi retribusi terhadap PAD	24.	meningkatnya pendapatan PAD dari pasar
			25.	adanya peningkatan pembangunan dari hasil retribusi pedagang
	3.	Efektivitas penerimaan retribusi pasar	1.	petugas melakukan pemungutan sesuai SOP yang ada
			2.	ramah dan sopan ditunjukan petugas ketika memungut retribusi
			3.	petugas menjelaskan pentingnya retribusi kepada para pedagang
			4.	pengetahuan masyarakat
Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah	1.	Kegiatan pemungutan retribusi	1	Tata cara pemungutan sesuai peraturan yang berlaku
			2	Pemenuhan target retribusi
			5.	ketercapaian target penarikan retribusi oleh petugas setiap bulan
			6.	Evaluasi hasil penagihan
	2	Penerapan sanksi administratif	7.	Adanya peningkatan pemasukan dari penarikan retribusi
			8.	Apresiasi dari dinas terkait
			9.	Tersedianya peraturan yang dapat dibaca oleh pedagang dilingkungan pasar
			10.	Adanya peringatan lisan/tertulis dari petugas
	3	Penerapan sanksi administratif	11.	Adanya sanksi administrative bagi pedagang yang tidak membayar retribusi

No.	Variabel	Dimensi	Indikator	Butir Item
				12. Adanya sanksi denda
2	Pemanfaatan	1	Penyediaan fasilitas balas jasa yang didapatkan pedagang. Indikator ini merujuk pada pasal 161 di atas.	13. Tersedianya kenyamanan lingkungan pasar bagi para pedagang 14. Adanya rasa keamanan bagi pedagang yang berjualan 15. Terciptanya ketertiban, kebersihan dan keindahan dilingkungan pasar 16. Tersedianya tempat cuci tangan/protokol kesehatan
		2	Pemanfaatan fasilitas oleh pedagang dan pembeli	17. Pedagang memanfaatkan fasilitas yang tersdiaa secara maksimal 18. Pemebeli merasakan kenyamanan ketika berbelanja di pasar
3	Pembukuan/pemeriksaan	1	Pemeriksaan uji kepatuhan	19. Pihak Dinas terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 20. Adanya pembukuan yang tersusun secara sistematis berkaitan penerimaan retribusi 21. Pihak dinas melakukan pemeriksaan secara rutin berkenaan penerimaan hasil retribusi 22. Evaluasi hasil pelaporan
		2	Kooperatif.	23. Sikap professional pelaksana 24. Petugas retribusi bersikap kooperatif ketika dilakukan monitoring dan evalausi 25. Petugas retribusi bersikap jujur terhadap hasil retribusi

3. Hasil Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis baik secara praktis maupun teoritis berkaitan dengan Terdapat pengaruh dari pelaksanaan kebijakan retribusi pasar terhadap kinerja UPT dalam mewujudkan efektivitas pemungutan retribusi Pasar. Hasil Penelitian ini tergambar dalam paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Model Paradigma Penelitian

3.1 Hasil Penelitian

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan model analisis jalur (*path anlisis*) berkaitan dengan pengujian hipotesis utama (simultan) maupun pengujian sub-sub hipotesis (simultan) dalam penelitian ini tersaji dalam tabel berikut :

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan model analisis jalur (*path anlisis*) berkaitan dengan pengujian hipotesis utama (simultan) maupun pengujian sub-sub hipotesis (simultan) dalam penelitian ini tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis Utama	Koefisien Jalur	Fhitung	Ftabel	Determinasi	Hubungan
Pengujian Hipotesis Utama Pengaruh pelaksanaan kebijakan retribusi pasar (X) terhadap kinerja UPT (Y) dalam mewujudkan efektivitas pemungutan retribusi Pasar (Z)	30,530	0,7497	3,1239	0,5621	Positif signifikan
Sub-sub hipotesis	Koefisien Jalur	thitung	ttabel	Determinasi	Hubungan
pengaruh pelaksanaan kebijakan kepegawaian terhadap disiplin kerja	0,7192	8,9038	1,993	51,72%	Positif signifikan
Terdapat pengaruh variabel kinerja UPT terhadap variabel efektivitas pemungutan retribusi	0,2474.	2,4258	1,993	15,94%	Positif signifikan
Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kepegawaian terhadap efektivitas kerja pegawai	0,5519	4,9168	1,993	40,27%	Positif signifikan

Dari hasil analisis menggunakan statistika dengan metode analisis jalur, maka diperoleh hasil bahwa secara simultan maupun parsial, Pelaksanaan Kebijakan retribusi pasar terhadap kinerja UPT dalam mewujudkan efektivitas pemungutan retribusi Pasar.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan retribusi pasar terhadap kinerja UPT dalam mewujudkan efektivitas pemungutan retribusi Pasar., dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, hasil analisis deskripsi variabel Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pasar menunjukan kriteria **Baik**, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi komunikasi yaitu Pelaksanaan kebijakan Retribusi Pasar telah di sampaikan secara jelas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Garut. Persentase terendah terdapat pada dimensi komunikasi yaitu Kebijakan Retribusi Pasar telah disosialisasikan secara efektif.

Kedua, hasil analisis deskripsi variabel Kinerja UPT menunjukan kriteria **baik**, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase

tertinggi ada pada dimensi Hasil kerja yaitu Para pegawai bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan secara terstruktur dan sistematis. Persentase terendah terdapat pada dimensi Manfaat retribusi bagi pedagang yaitu Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dapat dirasakan oleh para pedagang pasar.

Ketiga, hasil analisis deskripsi variabel variabel Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar menunjukkan kriteria **baik**, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi Penerapan sanksi administratif yaitu Para petugas memasang spanduk/poster berkenaan informasi tentang pentingnya membayar iuran retribusi pasar. Persentase terendah terdapat pada dimensi Penyediaan fasilitas balas jasa yang didapatkan pedagang yaitu Para pedagang, pembeli dan masyarakat merasakan ketertiban, kebersihan dan keindahan ketika beraktifitas di pasar.

Selanjutnya, temuan-temuan permasalahan penting lainnya yang terdapat dalam penelitian ini antara lain :

Pertama, pada variabel Pelaksanaan Kebijakan retribusi dalam dimensi komunikasi terdapat kelemahan hal ini didasarkan pada penilaian terendah pada variabel tersebut yaitu Dimensi komunikasi yaitu Kebijakan Retribusi Pasar telah disosialisasikan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan berkenaan kebijakan retribusi belum tersampaikan secara menyeluruh dan optimal khususnya kepada masyarakat dalam hal ini para pedagang pasar Ciawitali.

Kedua, pada variabel Kinerja UPT dalam dimensi Manfaat retribusi bagi pedagang yaitu Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dapat dirasakan oleh para pedagang pasar.

Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan dan dan Dinas Perindustrian dan perdagangan selaku pelaksana kebijakan untuk menata dan mengelola serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai

Ketiga, pada variabel Efektivitas pemungutan retribusi Pasar dalam dimensi dimensi Penyediaan fasilitas balas jasa yang didapatkan pedagang yaitu Para pedagang, pembeli dan masyarakat merasakan ketertiban, kebersihan dan keindahan ketika beraktifitas di pasar. hal tersebut disebabkan karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan pasar yang jauh dari bersih, serta kenyamanan dan keindahan yang dirasakan oleh pedagang maupun pembeli.

3.2.1 Pengujian Sub Hipotesis Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan retribusi pasar (X) terhadap kinerja UPT (Y)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (P_{yx}) sebesar 0,7192. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan retribusi Pasar terhadap Mkinerja UPT, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975 ; 74}$) yaitu $t_{hitung} = 8,9038 > t_{tabel} = 1,993$.

Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan retribusi Pasar berpengaruh Kinerja UPT. Adapun besar pengaruh Pelaksanaan Kebijakan retribusi Pasar terhadap Kinerja UPT adalah sebesar 51,72% sedangkan sisanya sebesar 48,28%

dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel kebijakan retribusi Pasar yang tidak dimasukan kedalam model.

3.2.2 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh kinerja UPT (Y) terhadap efektivitas pemungutan retribusi pasar (Z)

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur dan diperoleh nilai koefisien jalur (P_{zy}) sebesar 0,2474.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel kinerja UPT terhadap efektivitas pemungutan retribusi pasar, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975 ; 74}$) yaitu $t_{hitung} = 2,4258 > t_{tabel} = 1,9935$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel kinerja UPT berpengaruh terhadap variabel efektivitas pemungutan retribusi pasar.

Besar pengaruh variabel kinerja UPT terhadap variabel efektivitas pemungutan retribusi pasar secara langsung adalah sebesar 15,94% sedangkan sisanya sebesar 84,06% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel variabel kinerja UPT yang tidak dimasukan kedalam model.

3.2.3 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh pelaksanaan kebijakan retribusi pasar (X) terhadap efektivitas pemungutan retribusi pasar (Z)

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (P_{zx}) sebesar 0,551.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan retribusi Pasar, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975 ; 74}$) yaitu $t_{hitung} = 4,9168 > t_{tabel} = 1,993$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pasar berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan retribusi pasar.

Dari hasil pengujian di atas diketahui bahwa Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pasar memberikan pengaruh nyata dan positif terhadap efektivitas pemungutan retribusi pasar. Besar pengaruh secara langsung Pelaksanaan Kebijakan retribusi pasar terhadap efektivitas pemungutan retribusi pasar adalah sebesar 30,46% sedangkan pengaruh Pelaksanaan Kebijakan retribusi pasar melalui kinerja UPT adalah sebesar 9,82% %. Sehingga jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Pelaksanaan Kebijakan retribusi Pasar sebesar 40,27% sedangkan sisanya sebesar 59,73% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel variabel kebijakan retribusi Pasar yang tidak dimasukan kedalam model.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pasar Terhadap Kinerja UPT Dalam Mewujudkan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata jawaban responden terhadap ketiga variabel tersebut adalah **Baik**;

2. Hasil pengujian hipotesis utama dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pasar berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kinerja UPT Dalam Mewujudkan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar.
3. Hasil Pengujian sub hipotesis menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan retribusi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UPT. kinerja UPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemungutan retribusi pasar. pelaksanaan kebijakan retribusi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemungutan retribusi pasar.
4. pada variabel Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pasar dalam dimensi Komunikasi terdapat kelemahan hal ini didasarkan pada penilaian terendah pada variabel tersebut yaitu Kebijakan Retribusi Pasar telah disosialisasikan secara efektif.
5. pada variabel Kinerja UPT dalam dimensi Hasil kerja terdapat kelemahan mengenai Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dapat dirasakan oleh para pedagang pasar.
6. pada variabel Efektivitas Pemungutan Retribusi pegawai dalam dimensi Penyediaan fasilitas balas jasa yang didapatkan pedagang terdapat kelemahan mengenai Para pedagang, pembeli dan masyarakat merasakan ketertiban, kebersihan dan keindahan ketika beraktifitas di pasar.

Daftar Pustaka

I. Buku-Buku

- Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ali, Fariedl. 2019. *Teori dan Konsep Administrasi*, Rajagrafindo, Depok.
- Kemendikbud, 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Fokusmedia, 2017. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Fokus Media, Jakarta
- Iskandar, Jusman, 2019. *Bunga Rampai Administrasi Negara*, Puspaga, Bandung
- _____, 2019. *Dinamika Kelompok Organisasi dan Komunikasi Sosial*, Puspaga Bandung.
- _____, 2019, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Puspaga, Bandung.
- _____, 2018, *Teori Administrasi*, Puspaga, Bandung.
- _____, 2018, *Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel-Variabel Sosial dan Psikologi*, Puspaga, Bandung.
- Mardiasmo, 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Moeheriono, 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 2010. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University, Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2013. *Budaya Organisasi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2013. *Pengantar Teori Pengembangan SDM*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ndraha. Taliziduhu. 2005. *Kybernologi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nugroho, Riant. 2010. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pamuji, 2014. *Ekologi Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta

- Prawirosentono, 2010. *Manajemen Sumberdaya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan: Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Era Perdagangan Bebas Dunia (Edisi 2)*, BPFE, Yogyakarta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyasih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gaya Media, Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi*, Rajagrafindo, Depok.
- Silalahi, Ulbert. 2011. *Studi tentang Ilmu Administrasi*, Sinar Baru, Bandung.
- Sinambela, 2012. *Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sobandi . 2010. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*, Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung
- Suryadi, 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Refika Aditama, Bandung
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta, Bandung
- Uno, Hamzah. 2012. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*, Bumi Aksara, Jakarta
- Wahab, Solihin Abdul., 2017. *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*, buku 1 Edisi 9. Salemba Empat. Jakarta

II. Jurnal dan Penelitian Ilmiah

- Dewi, Octaviana Candra. 2013. *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Muslihat, Asep. 2019. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Surat Izin Mengemudi (SIM) Online Terhadap Kinerja Anggota dalam Mewujudkan Efektivitas Pelayanan SIM pada SATPAS Polres Garut*, Program Pascasarjana Universitas Garut.

III. Dokumen-Dokumen

- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar;
- Peraturan Bupati Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- UPT pasar Guntur Ciawitali- Rekapitulasi data pedagang Pasar Guntur Ciawitali
- UPT pasar Guntur Ciawitali- Laporan realisasi penerimaan retribusi pasar UPT Pasar Guntur Ciawitali 2016-2019.